

Nomor

: 012/AP/I/2024

Tanggal

: 26 Januari 2024

Lampiran

: 1(satu) berkas

Kepada

PERBARINDO dan Majalah Media BPR

Perihal

: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023 dari PT BPR Anugerah Paktomas .

Demikian Laporan tersebut kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT.BPR. AND GERAH PAKTOMAS

Endang Sugiarti TULUNGAGUNG

Direktur Utama



Nomor

: 011/AP/I/2024

Tanggal

: 26 Januari 2024

Lampiran

: 1(satu) berkas

Kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Kediri Jl. Brawijaya No.3 Kediri

Perihal

: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023 dari PT BPR Anugerah Paktomas.

Demikian Laporan tersebut kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT.BPR. ANUGERAH PAKTOMAS

**Endang Sugiarti** Direktur Utama

### Tanda Bukti Kirim



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

#### PT BPR Anugerah Paktomas

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2023

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

665665-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600944-26012024084630

User ID Petugas Pelaporan

paktomas@yahoo.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 08:46:30



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

# LAPORAN

PENERAPAN

TATA KELOLA Tahun 2023





**C** 0355395198

**⋒** 0355395482





#### BAB I PENJELASAN UMUM

#### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

#### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Anugerah Paktomas mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Persereoan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Plhak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- I. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023 (NON-OJK) PT. BPR ANUGERAH PAKTOMAS



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Anugerah Paktomas beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

#### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakesholder.

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

#### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ANUGERAH PAKTOMAS

#### 1 Transparancy (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hakhak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

#### 2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### 3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### 4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

#### 5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

#### E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Anugerah Paktomas juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Anugerah Paktomas sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



#### BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi					
1	Nama	: ENDANG SUGIARTI				
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama				
1	-	: O100 - Direktur Utama  : Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dar target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur lain dan staff yang terkait.  Memantau seluruh kegiatan operasiona perusahaan.  Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapa target yang direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.  Mengadakan ,menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta.  Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilar yang berhubungan dengan segala urusan yang dengan Bank.  Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan.  Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinas performance bawahan dan Bank.  Memanage dan memantau seluruh kegiatar operasional perusahaan yang menjadi tanggung				
		operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.  Memantau dan menjaga agak kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.  Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai yang digariskan oleh Komisaris dan Pemegang Saham tanpa melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.  Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangantunjangan lainnya bagi staf atau karyawan kepada komisaris.  Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan staf dan karyawan.  Membina dan meningkatkan profesionalisme staf dan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan baik				
		internal amupun eksternal.  Memastikan praktek perkreditan yang sehat sesua dengan ketentuan.  Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.				



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi			
1	Nama	: DEDY YUDIANTO		
	Jabatan	: 0200 - Direktur		
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ul> <li>Memberikan motivasi kepada seluruh staf dan karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan.</li> <li>Mengusulkan promosi jabatan kepada setiap staf atau karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi syarat.</li> <li>Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan.</li> <li>Memeriksa,menyetujui,menolak dan menandatangani laporan keuangan,dll.Bertanggung jawab atas kredit bermasalah yang berdampak NPL.</li> <li>Wajib mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan ekonomi.</li> <li>Mengawasi,membina dan menilai pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.</li> </ul>		

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

#### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris				
1	Nama	: HERI PRAYITNO			
	Jabatan	: Komisaris Utama			
	Tugas dan Tanggung Jawab	: HERI PRAYITNO : Komisaris Utama			



yang mengatur mengenai BMPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern Bank,Audit Ekstern Bank,hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lainnya.

Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan atau perbankan dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja paling sedikit mencantumkan etika kerja,waktu kerja dan peraturan rapat.

	peraturan rapat.			
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris			
1	Nama	: FITRI SRI LESTARI		
	Jabatan	: Komisaris		
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ul> <li>Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</li> <li>Setiap anggota Dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha bank sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>Anggota Dewan Komisaris baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai bank dan berhak memeriksa semua pembukuan,surat dan alat bukti lainnya,memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain</li> </ul>		
serta berhak memeriksa laporan GCG ANUGERAH PAKTOMAS untuk mengetahui		serta berhak memeriksa laporan GCG PT.BPR ANUGERAH PAKTOMAS untuk mengetahui segala		

Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seoran atau lebih anggota direksi jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank,merugikan Bank,melalaikan kewajiban, melanggar peraturan perundangan yang berlaku, adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Bank.

tindakan yang dijalankan oleh Direksi.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan RBB secara semesteran kepda OJK paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.Dewan Komisaris melakukan rekomendasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan



oleh KAP dan dilaporkan kepada OJK paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas,tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank,Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris,serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

#### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite			
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -			
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -			
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -			

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

				Komite			Pihak
	No	Nama	Keahlian	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Independen
ĺ	-	-	-	-	-	-	-



#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1	Komite Audit			
	Program Kerja : -			
	Realisasi : -			
	Jumlah Rapat : -			
2	Komite Pemantau Risiko			
	Program Kerja : -			
	Realisasi : -			
	Jumlah Rapat : -			
3	Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program Kerja : -			
	Realisasi : -			
	Jumlah Rapat : -			

#### **B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	ENDANG SUGIARTI	-	-
2	DEDY YUDIANTO	-	-

#### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

#### C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

	0 00 1			
		Hubungan Keuangan		
No	Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ENDANG SUGIARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DEDY YUDIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada



#### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

	<u> </u>			
		Hubungan Keluarga		
No	Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ENDANG SUGIARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DEDY YUDIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

#### D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	HERI PRAYITNO	-	-
2	FITRI SRI LESTARI	-	-

#### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

## E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

	<u> </u>	<u>.</u>			
		Hubungan Keuangan			
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham	
1	HERI PRAYITNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
2	FITRI SRI LESTARI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

#### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

			Hubungan Keluarga	Э
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HERI PRAYITNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FITRI SRI LESTARI	tidak ada	tidak ada	tidak ada



## F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

#### Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

	. Ienis Remunerasi		Direksi		Dewan Komisaris	
No	(dalam 1 tahun)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	
1	Gaji	2	66.750.000 2		76.500.000	
2	Tunjangan	2	88.650.000	2	0	
3	Tantiem	2	0	2	0	
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0	
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0	
	Total		155.400.000		76.500.000	

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)			
No	(dalam 1 tahun)	Direksi	Dewan Komisaris		
1	Perumahan	1 unit rumah dinas	tidak ada		
2	Transportasi	2 unit mobil	tidak ada		
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	tidak ada		
4	Fasilitas lainnya	Uang makan total sebesar Rp. 6.575.000 setahun	uang makan Rp. 5.475.000 dan BBM Rp. 9.600.000 setahun.		

#### G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Votavangan	Perban	dingan
Keterangan	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,80	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,21	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,52	1

#### H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

#### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-4-18	2	Rencana Bisnis BPR
2	2023-7-18	2	Isu-isu strategis BPR
3	2023-10-25	2	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
4	2024-1-17	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR



#### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

		Jumlah	Tingkat	
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Fisik	Telekonferensi	Kehadiran (dalam %)
1	HERI PRAYITNO	4	0	100,00%
2	FITRI SRI LESTARI	4	0	100,00%

#### I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan			Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
Internal	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
(Dalam 1 Tahun)	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

#### J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)		
Permasalahan nukum	Perdata	Pidana	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-	
Dalam proses penyelesaian	-	-	
Total	-	-	



#### TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Transaksi	(Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	SINDUKARTO	DIREKSI CV ELANG MAHKOTA GEMILANG	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	PELATIHAN	38	Sesuai ketentuan internal
2	CHAYO	DIREKSI PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	CBS	21	Sesuai ketentuan internal
3	VIVI DALIMARTHA HERLAMBANG	DIREKSI CV ANUGERAH GIANT ABADI	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	INSURANCE	23	Sesual ketentuan internal
4	KUNTJONO	DIREKSI CV KRESNA YURISDIKA	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	KONSULTAN HUKUM	20	Sesuai ketentuan internal
5	IVAN WAHYUDI	PEMILIK GEDUNG KANTOR PUSAT	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	SEWA GEDUNG	55	Sesuai ketentuan internal

#### PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
•	-	-	-	-	-

#### M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anugerah Paktomas ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anugerah Paktomas. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anugerah Paktomas ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anugerah Paktomas, Terima Kasih.

> **TULUNGAGUNG, 25 Januari 2024** Persetujuan Pengurus PT. BPR Anugerah Paktomas

**HERI PRAYITNO KOMISARIS UTAMA**  ENDANG SUGIARTI DIREKTUR UTAMA